

## Peringkat Enam Pelayanan Publik Walikota Tak Puas



Sutarmidji

**PONTIANAK.** Walikota Pontianak, H Sutarmidji SH, MHum mengakui, masih merasa belum puas kendati Kota Pontianak meraih ranking enam

dalam pelayanan publik secara nasional. "Kenapa saya tidak puas dengan hasil yang telah dicapai, karena kita memiliki kemampuan meraih lebih dari itu," ungkap Sutarmidji, ketika melantik Dewan Pengawas PDAM di ruang rapat Kantor Walikota, kemarin pagi.

Tak hanya itu, dia juga merasa belum puas meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Makanya Sutarmidji menekankan, seluruh jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, lebih serius menangani semua persoalan yang jadi tugas pokok, dan fungsi masing-masing

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Terkait pelayanan publik, Sutarmidji menyayangkan, masih ada SKPD yang menghambat pelayanan terutama Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Karena ketidaktahuai masyarakat dalam mengurusat. IMB, dulunya melalui Dinas Tata Ruang (sekarang Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan, red.) ternyata dibiarkan saja, bukannya diteruskan ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T).

"Kalau ada warga yang memasukkan berkas permohonan IMB ke Cipta Karya, harusnya Cipta Karya memberitahukan kepada pemohon. Supaya memasukkannya melalui BP2T,"

ingat Midji. Sutarmidji mengingatkan, peristiwa serupa hendaknya tidak terulang kembali, mengingat kini merupakan masa transparansi dimana semuanya terbuka. Sebab pada hakikatnya, Midji berkomitmen, akan memberikan pelayanan publik yang cepat, efisien dan transparan.

Bahkan komitmen itu telah dibuktikan, dengan memberikan sanksi pada pegawai yang menghambat pelayanan. Termasuk pegawai yang melakukan pungutan liar, serta memberikan potongan retribusi setiap keterlambatan pelayanan perizinan sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan. (dna)